

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DIMEDIASI OLEH
PERTUMBUHAN EKONOMI PADA KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

TESIS



**Adelaida Krista Manesanulu
1221 00792**

**PROGRAM PASCASARJANA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
2024**

UJIAN TESIS

Tesis berjudul:

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
DIMEDIASI OLEH PERTUMBUHAN EKONOMI PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR

Telah diuji pada tanggal: 17 Januari 2024

Tim Penguji:

Ketua



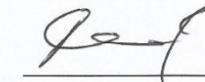
Prof. Dr. Dody Hapsoro, M.S.P.A., M.B.A., Ak., CA.

Anggota



Dr. Theresia Trisanti, M.B.A., Ak., CA.

Pembimbing 1



Dr. Rudy Badrudin, M.Si

Pembimbing 2



Prof. Dr. Baldrice Siregar, M.B.A., C.M.A., Ak., CA.

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
DIMEDIASI OLEH PERTUMBUHAN EKONOMI PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR**

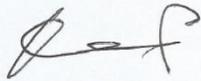
dipersiapkan dan disusun oleh:

Adelaida Krista Manesanulu

Nomor Mahasiswa: 122100792

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal: 17 Januari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat
diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Akuntansi (M.Ak.) di bidang Akuntansi

Pembimbing 1

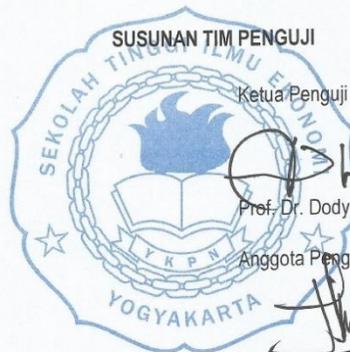


Dr. Rudy Badrudin, M.Si

Pembimbing 2



Prof. Dr. Baldric Siregar, M.B.A., C.M.A., Ak., CA.



Ketua Penguji



Prof. Dr. Dody Hapsoro, M.S.P.A., M.B.A., Ak., CA.

Anggota Penguji



Dr. Theresia Trisanti, M.B.A., Ak., CA.

Yogyakarta, 17 Januari 2024
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
Ketua,



Dr. Wisnu Prajogo, MBA.



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA YOGYAKARTA
JL. SETURAN, YOGYAKARTA 55281, P.O. BOX 1014 YOGYAKARTA 55010
TELP. (0274) 486160, 486321, FAKS. (0274) 486155 www.stieykpn.ac.id

Pernyataan Keaslian Karya Tulis Tesis

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa tesis dengan judul:

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
DIMEDIASI OLEH PERTUMBUHAN EKONOMI PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR**

diajukan untuk diuji pada tanggal 17 Januari 2024, adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian karya tulis orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan orang lain. Bila dikemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, maka saya bersedia menerima pembatalan gelar dan ijasah yang diberikan oleh Program Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta batal saya terima.

Yogyakarta, 17 Januari 2024

Yang memberi pernyataan

Saksi 1, sebagai Ketua Tim Penguji

Prof. Dr. Dody Hapsoro, M.S.P.A., M.B.A., Ak., CA.

Adelaida Krista Manesanulu

Saksi 2, sebagai Anggota Penguji

Dr. Theresia Trisanti, M.B.A., Ak., CA.

Saksi 4, sebagai Pembimbing 2

Prof. Dr. Baldris Siregar, M.B.A., C.M.A., Ak., CA.

Saksi 3, sebagai Pembimbing 1

Dr. Rudy Badrudin, M.Si

Saksi 5, sebagai Ketua STIE YKPN Yogyakarta



Dr. Wisnu Prajogo, MBA.

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DIMEDIASI OLEH PERTUMBUHAN EKONOMI PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Adelaida Krista Manesanulu¹
Rudy Badrudin²
Baldric Siregar^{3*}

¹Graduate Program, Master of Accountancy, ^{2,3}Department of Management
^{1,2,3}YKPN School of Business (STIE YKPN), Yogyakarta, Indonesia
*Corresponding author; e-mail: adelaidamanesanulu@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of expenditure on the education function, health function and tourism function on economic growth, as well as the influence of economic growth in mediating expenditure on the education function, health function and tourism function on the human development index in districts/cities in NTT Province. Determining the sample collection technique for this research used a purposive sampling technique, and the research samples used were 22 districts/cities in NTT Province in the 2016-2021 period. Secondary data sources used for this research come from APBD realization reports, ADHK GRDP growth rate statistical data and 2016-2021 HDI statistical data in districts/cities in NTT Province. This research uses quantitative data analysis techniques with the SmartPLS statistical data processing program. The results of the research show that there is no influence of expenditure on education functions on economic growth, there is an influence of expenditure on health functions and tourism functions on economic growth, and economic growth is unable to mediate expenditure on education functions, health functions and tourism functions on HDI.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan di Indonesia yang sebelumnya sistem sentralisasi berubah menjadi sistem desentralisasi. Perubahan ini dipicu oleh timbulnya ketidakadilan pada daerah-daerah di Indonesia, yang dapat mengakibatkan potensi sumber daya dimasing-masing daerah tidak tersalurkan secara maksimal, untuk itu diterapkan sistem desentralisasi. Desentralisasi ialah pelimpahan urusan pemerintah pusat pada daerah otonom berlandaskan asas otonomi. Berkaitan dengan ini, daerah punya hak untuk menetapkan kebijakan dalam melangsungkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk dalam hal kebijakan fiskal. Adanya kebijakan desentralisasi fiskal memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran, salah satunya pengeluaran pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 33 mengklasifikasikan pengeluaran pemerintah sebagai belanja per fungsi pada beberapa sektor, ini terbagi dalam sembilan fungsi yakni pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, serta perlindungan sosial. Pengeluaran pemerintah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi anggaran pemerintah pada tiap fungsi berfluktuasi tiap tahunnya, menyesuaikan dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan, yang tujuannya diarahkan untuk mendukung perencanaan program pembangunan ekonomi agar terealisasi dengan baik, dan menuju pada pembangunan ekonomi daerah yang optimal.

Pembangunan ekonomi daerah ialah usaha peningkatan taraf hidup masyarakat di suatu daerah. Wujud pembangunan ekonomi salah satunya dilihat dari pertumbuhan sektor-sektor publik. Pertumbuhan sektor-sektor pada beberapa daerah di Indonesia masih dalam tahap perkembangan dan berfluktuasi, termasuk di Provinsi NTT. Tanpa mengesampingkan belanja per fungsi pada sektor-sektor yang lain, berdasar data pada kajian fiskal regional Provinsi NTT tahun 2022, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dari sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor pariwisata. Besar kecilnya belanja pengeluaran pemerintah mempengaruhi naik turunnya produk domestik regional bruto (PDRB). Indikator penting penentu kondisi ekonomi di suatu wilayah salah satunya ialah PDRB. Selain sebagai indikator penentu kondisi ekonomi, PDRB juga merupakan indikator ekonomi dalam menentukan dimensi Pembangunan Manusia.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Ariansyah (2018) pada 15 provinsi di Indonesia menggunakan variabel dependen berupa IPM, variabel independennya pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, serta variabel mediasinya PDRB perkapita. Lebih lanjut, Mongan (2019) meneliti pada 32 provinsi di Indonesia menggunakan variabel dependen berupa IPM, variabel independen berupa Persentase belanja pemerintah pusat dan daerah bidang pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum, variabel mediasi yang digunakan berupa PDRB.

Berbeda dengan penelitian Ariansyah (2018) dan Mongan (2019), peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini di Provinsi NTT dengan menetapkan variabel dependen berupa IPM, variabel independen berupa pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan, kesehatan, dan pariwisata, serta pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi yang diprosikan dengan PDRB. Peneliti menggunakan periode tahun 2016 hingga tahun 2021, ini dikarenakan data telah dipublikasikan pada periode tersebut dan terdapat kemungkinan bahwa data telah direvisi, sehingga memudahkan dalam perolehan data, dan data dari tiap-tiap daerah lebih akurat. Berdasarkan pemaparan ini,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

peneliti termotivasi untuk meneliti dengan judul “Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur”

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Teori Keagenan

Teori Keagenan ialah teori yang menggambarkan relasi antar dua pihak yakni *principal* dengan *agent*. *Principal* ialah pihak yang memberikan wewenang, sedangkan *agent* berperan sebagai pelaksana. Penggunaan teori keagenan pada penelitian ini didasarkan pada hubungan antar pemerintah pusat selaku *principal* atau pihak pemberi wewenang dengan pemerintah daerah selaku *agent* sebagai pelaksana wewenang. Teori keagenan di sini, dipakai untuk menganalisis relasi antar pemerintah pusat (*principal*) dengan pemerintah daerah (*agent*) pada kaitannya dengan pengeluaran sektor publik.

Desentralisasi Fiskal

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan urusan pengelolaan pemerintahan daerah ditangani dan dikerjakan oleh pemerintah daerah itu sendiri berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan, hal ini dinamakan desentralisasi dan ini tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah. Dalam hal ini, pemerintah pusat melimpahkan sebagian otoritas untuk penanganan keuangan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan daerah.

Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan

Belanja pemerintah daerah fungsi pendidikan menjadi salah satu dari klasifikasi belanja menurut fungsi. Besaran alokasi anggaran belanja fungsi pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84/PMK.7/2009 mengenai alokasi anggaran belanja fungsi pendidikan melalui APBD, yang menetapkan bahwa belanja pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (termasuk gaji) yang pengalokasiannya minimal sebesar 20% dari APBN pada sektor pendidikan. Alokasi di daerah minimal 20% dari APBD.

Pengeluaran Pemerintah Fungsi Kesehatan

Anggaran untuk pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan yang menegaskan bahwa pengalokasian dana kesehatan senilai 5% di luar gaji yang bersumber dari APBN, untuk pemerintah kota/kabupaten dan provinsi senilai 10% di luar gaji yang bersumber dari APBD.

Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pariwisata

Pengeluaran pemerintah daerah fungsi pariwisata termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasar belanja per fungsi untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara. Setiap tahun pengalokasian dana untuk sektor pariwisata ditetapkan dalam UU tentang ABPN untuk tahun yang bersangkutan, dan disalurkan melalui dana alokasi khusus (DAK) fisik dan non fisik.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Pertumbuhan ekonomi merupakan penentu kesuksesan pembangunan daerah. Tinggi dan berkelanjutannya pertumbuhan ekonomi menjadi pendorong utama kelangsungan pembangunan ekonomi (Suparno, 2014). Ini tentunya tidak terlepas dari intervensi pemerintah dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan serta sumber daya alam ataupun manusia yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu sisi keberhasilan dari suksesnya pembangunan pada suatu wilayah baik pusat maupun daerah dapat tercermin dari kualitas hidup manusia atau masyarakat di dalam wilayah tersebut. Tahun 1990, *United Nations Development Programme* (UNDP) mengembangkan gagasan penilaian pembangunan manusia dalam rupa Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), lalu diumumkan secara periodik dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM menerangkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan guna mendapat penghasilan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Tiga dimensi dasar pembentuk IPM yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak (Badan Pusat Statistik, 2023).

METODE

Objek populasi penelitian ini ialah seluruh daerah kabupaten/kota di Provinsi NTT pada periode waktu tahun 2016-2021. Provinsi NTT tersebar menjadi 21 kabupaten dan 1 kota. Penentuan teknik pengumpulan sampel untuk penelitian ini yakni memakai teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang termasuk dalam jenis *nonprobability sampling*. Sampel yang akan dipakai ditentukan dengan cara memberikan karakteristik yang sesuai untuk memenuhi tujuan dan masalah pada penelitian.

Sumber data penelitian ini ialah data sekunder. Jenis data penelitian yakni data sekunder yang berupa data realisasi pengeluaran fungsi pendidikan, pengeluaran fungsi kesehatan, dan pengeluaran fungsi pariwisata melalui APBD, data laju PDRB ADHK, serta data IPM pada kabupaten/kota di Provinsi NTT pada tahun 2016 hingga 2021. Data sekunder pada penelitian ini didapatkan dari DJPK lewat situs www.djpk.kemenkeu.go.id, dalam bentuk publikasi pemerintah berupa realisasi APBD menurut belanja per fungsi pada kabupaten/kota di Provinsi NTT untuk tahun 2016 hingga 2021. Untuk mengetahui data statistik laju PDRB ADHK pada kabupaten/kota di Provinsi NTT tahun 2016 hingga 2021 dan data IPM untuk kabupaten/kota di Provinsi NTT tahun 2016 hingga 2021, dapat dilihat pada situs web Badan Pusat Statistik Provinsi NTT melalui situs ntt.bps.go.id.

Penerapan teknik analisis data pada penelitian ini memakai analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif pada umumnya menerapkan uji statistik untuk pengujian datanya. Untuk itu, penelitian ini menggunakan alat analisis untuk mengolah data berupa program pengolahan data statistik SmartPLS versi 4 dan *microsoft Excel*. Metode analisis yang dipakai untuk menganalisis data penelitian ialah analisis statistik deskriptif, dan *Structural Equation Modeling* (SEM).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

HASIL ANALISIS PENELITIAN

Uji *Goodness Of Fit*

Tabel 1
Model Fit SRMR

	<i>Saturated model</i>	<i>Estimated model</i>
SRMR	0.000	0.099
d_ ULS	0.000	0.146
d_ G	0.000	0.023
Chi-square	0.000	15.094
NFI	1.000	0.916

Ukuran kesesuaian model dengan SRMR menetapkan bahwa model fit apabila nilai SRMR < 0,10 atau 0,08. Pada tabel 1 menampilkan nilai saturated model sebesar 0,000 dan estimated model sebesar 0.099 lebih kecil dari 0,10 atau 0,08 artinya model struktural yang dipakai dalam penelitian ini layak untuk digunakan.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2
Collinearity Stastic VIF

	<i>VIF</i>
PEND	1.000
KES	1.000
PAR	1.000
PE	1.000
IPM	1.000

Ketentuan nilai VIF <10 atau <5 menunjukkan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen (eksogen). Dari tabel 2 dapat dilihat nilai *collinearity stastic VIF* pada variabel PEND, KES, dan PAR sebesar 1,000 artinya model dapat diestimasi karena tidak terjadi multikolinearitas.

Uji *R-Square*

Tabel 3
Hasil Uji *R-Square*

	<i>R-Square</i>	<i>R-Square Adjusted</i>
IPM	0.001	-0.006

Hasil pengujian *R-Square* pada tabel 3 memperlihatkan nilai *R-Square* sebesar 0,010. Nilai ini memberi penjelasan bahwa perubahan variabel IPM dapat dijelaskan oleh variabel PEND, KES, PAR hanya sebesar 1%, lalu 99% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Rendahnya nilai *R-Square* ini memperlihatkan pengaruh variabel independen yang kecil terhadap variabel dependen. Hal ini mungkin terjadi karena adanya pengaruh dari belanja lainnya yang lebih besar, seperti belanja modal dari semua jenis belanja pada belanja daerah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji Hipotesis

Tabel 4
Hasil Pengujian Hipotesis

No		<i>Original Sample</i>	<i>T Statistic</i>	<i>P Value</i>	Prediksi	Temuan	Hipotesis Penelitian
1	PEND→PE	0.186	1.426	0.154	Positif	Positif	Ditolak
2	KES→PE	-0.573	4.409	0.000	Positif	Negatif	Ditolak
3	PAR→PE	0.241	3.704	0.000	Positif	Positif	Diterima
4	PEND→PE→IPM	-0.018	0.671	0.503			Ditolak
5	KES→PE→IPM	0.057	0.823	0.411			Ditolak
6	PAR→PE→IPM	-0.024	0.776	0.438			Ditolak

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis untuk penelitian ini menampilkan hasil pengujian dengan data asli. Peneliti tidak melakukan perbandingan pengujian dengan data transmormasi (Log) dikarenakan pada data asli variabel pertumbuhan ekonomi terdapat angka negatif yang bila ditransfomasikan (Log) tidak terdefinisi atau tidak ada. Pengujian dengan memakai data asli diperoleh hasil bahwa hanya satu hipotesis yang diterima, lalu lima hipotesis lainnya ditolak.

PEMBAHASAN

Pengaruh pengeluaran fungsi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi NTT

Pengeluaran fungsi pendidikan ialah sejumlah besar dana yang memang dikhususkan untuk tujuan menyokong majunya pendidikan. Pengeluaran ini punya peran penting dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan fasilitas serta sarana pendukung pendidikan yang layak bagi masyarakat usia sekolah. Hasil penelitian ini tidak mampu menjawab masalah penelitian, yang mana menunjukkan bahwa pengeluaran fungsi pendidikan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi NTT. Hal ini turut menunjukkan bahwa tujuan penelitian tidak tercapai karena dari hasil pengujian dan analisis data, serta pemaparan bukti pengolahan data memperlihatkan bahwa tidak ada pengaruh pengeluaran fungsi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi NTT. Akan tetapi, hasil ini mengkonfirmasi ketepatan penggunaan teori keagenan. Teori keagenan pada penelitian ini mengungkapkan bahwa kurangnya pengawasan pemerintah pusat dalam memastikan kinerja pemerintah daerah menyebabkan adanya anggaran belanja yang tidak terealisasi dengan tepat atau anggaran tidak mencerminkan alokasi pemenuhan sumber daya kepada masyarakat. Sama halnya dengan hasil penelitian ini yang memberi anggapan bahwa besaran realisasi pengeluaran fungsi pendidikan oleh pemerintah di kabupaten/kota Provinsi NTT selama tahun 2016-2021 yang tidak terealisasi secara merata serta tidak tepat sasaran dapat menghambat majunya kualitas layanan pendidikan di NTT. Pengeluaran fungsi pendidikan ini tidak dipakai secara efisien dan efektif, mungkin disebabkan karena terpecahnya lokasi pulau-pulau sehingga menimbulkan banyak pengeluaran untuk perjalanan dinas, pembayaran gaji, tunjangan dan lainnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Afriadi et al. (2020) yang membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sebagai akibat

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dari struktur belanjanya. Bertentangan dengan hasil ini, hasil penelitian Putra (2017) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya pengeluaran ini dapat meningkatkan nilai tambah pada PDRB untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh pengeluaran fungsi kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi NTT

Pengeluaran fungsi kesehatan ialah besaran dana yang dianggarkan untuk mendanai urusan kesehatan masyarakat. Pengeluaran ini berperan penting dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui tersedianya sarana dan jaminan kesehatan yang bermutu dan layak bagi masyarakat. Hasil penelitian ini mampu menjawab masalah penelitian yakni pengeluaran fungsi kesehatan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi NTT. Hasil ini turut menunjukkan tercapainya tujuan penelitian, sebab dari hasil pengujian dan analisis data, serta pemaparan bukti pengolahan data memperlihatkan bahwa ada pengaruh pengeluaran fungsi kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi NTT. Hasil ini juga mengkonfirmasi ketepatan penggunaan teori keagenan. Dalam penelitian ini, teori keagenan mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sebagai pelaksana anggaran dapat mengatur besaran realisasi anggaran belanja untuk mendanai kegiatan masing-masing sektor publik pada tahun yang bersangkutan. Realisasi anggaran belanja yang tepat oleh pemerintah daerah terwujud dari adanya peningkatan pada fasilitas maupun pelayanan publik bagi masyarakat. Sama halnya dengan hasil penelitian ini yang memberi anggapan bahwa besaran realisasi pengeluaran fungsi kesehatan oleh pemerintah di kabupaten/kota Provinsi NTT selama tahun 2016-2021 yang terealisasi secara merata serta tepat sasaran dapat mendukung pelaksanaan program-program peningkatan kesehatan. Hasil penelitian ini sepadan dengan hasil penelitian Nugroho (2016) yang membuktikan bahwa ada pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, berbeda dengan hasil tersebut, hasil penelitian Putra (2017) membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan arah hubungan yang negatif atau tidak searah, artinya pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan akan mengurangi nilai tambah PDRB atau menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh pengeluaran fungsi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi NTT

Pengeluaran fungsi pariwisata ialah sejumlah besar dana yang difungsikan untuk mendanai belanja pariwisata, dalam rangka perbaikan dan peningkatan destinasi hiburan masyarakat. Pengeluaran ini punya peran penting dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan akses serta sarana rekreasi masyarakat yang memadai. Hasil penelitian ini mampu menjawab masalah penelitian, yang mana menunjukkan bahwa pengeluaran fungsi pariwisata berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi NTT. Hasil ini juga menunjukkan tercapainya tujuan penelitian yang nampak dari hasil pengujian dan analisis data, beserta pemaparan bukti pengolahan data yang memperlihatkan pengaruh pengeluaran fungsi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi NTT. Lebih lanjut, teori keagenan pada penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai pelaksana anggaran dapat mengatur besaran realisasi anggaran belanja untuk mendanai kegiatan masing-masing sektor publik pada tahun yang bersangkutan. Realisasi anggaran belanja yang tepat oleh pemerintah daerah terwujud dari adanya peningkatan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pada fasilitas maupun pelayanan publik bagi masyarakat. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi teori tersebut dan menjelaskan bahwa besaran realisasi anggaran belanja yang cukup dan tepat sasaran oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi NTT selama tahun 2016-2021 untuk mendanai perbaikan dan pengembangan sektor pariwisata mampu mendukung perkembangan sektor pariwisata di NTT. Hasil penelitian ini searah dengan hasil penelitian Maksvytienė & Jankevičiūtė (2018) yang mengidentifikasi adanya dampak positif sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi. Lain halnya dengan ini, hasil penelitian Putri (2019) mengungkapkan sebaliknya bahwa pengeluaran pemerintah sektor pariwisata berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi memediasi pengaruh pengeluaran fungsi pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi NTT

Keberhasilan pembangunan daerah dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Jika daerah menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka mengindikasikan bahwa masyarakatnya sejahtera atau punya kualitas hidup yang membaik, yang tercermin melalui angka IPM. Hasil penelitian ini tidak mampu menjawab masalah penelitian, yakni membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memediasi pengeluaran fungsi pendidikan terhadap IPM pada kabupaten/kota di Provinsi NTT. Hasil ini juga turut membuktikan tidak tercapainya tujuan penelitian yang nampak dari hasil pengujian dan analisis data, serta pemaparan bukti pengolahan data yang memperlihatkan tidak ada pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam memediasi pengeluaran fungsi pendidikan terhadap IPM pada kabupaten/kota di Provinsi NTT. Lalu, berkaitan dengan teori, pada penelitian ini teori keagenan yang dipakai menjelaskan bahwa kurangnya pengawasan pemerintah pusat dalam memastikan kinerja pemerintah daerah menyebabkan adanya anggaran belanja yang tidak terealisasi dengan tepat atau anggaran tidak mencerminkan alokasi pemenuhan sumber daya kepada masyarakat. Sejalan dengan teori, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa realisasi pengeluaran fungsi pendidikan yang belum tepat sasaran oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi NTT selama tahun 2016-2021 tidak mampu membiayai perbaikan kualitas layanan pendidikan, dan perlahan dapat menghadirkan masalah bagi sektor pendidikan di NTT. Pengeluaran fungsi pendidikan ini tidak dipergunakan dengan efisien dan efektif, mungkin disebabkan karena alokasi belanja lebih difokuskan untuk belanja operasional pemerintah (belanja rutin), belanja pegawai, belanja modal, belanja hibah, belanja transfer dan belanja tak terduga, yang proporsinya lebih besar dari pada pengeluaran pemerintah untuk belanja pembangunan pada sektor pendidikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Mahulauw et al. (2016) yang mengungkapkan bahwa belanja pemerintah sektor pendidikan tidak punya pengaruh signifikan pada peningkatan IPM secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi, ini dikarenakan anggaran pendidikan belum sesuai amanah konstitusi yakni sebesar 20%, walau telah diupayakan peningkatan. Adapun hasil penelitian Putra (2017) membuktikan sebaliknya bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara tidak langsung terhadap IPM.

Pertumbuhan ekonomi memediasi pengaruh pengeluaran fungsi kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi NTT

Pengeluaran fungsi kesehatan ialah bentuk usaha nyata dan perhatian pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan serta mendukung terciptanya peningkatan kualitas manusia. Realisasi pengeluaran ini diperuntukan bagi peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Jika masyarakat sehat, maka masyarakat bisa ikut serta

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dalam upaya pembangunan ekonomi daerah. Peningkatan pembangunan ekonomi dapat meningkatkan pula kualitas modal manusianya yang nampak pada angka IPM. Hasil penelitian ini tidak mampu menjawab masalah penelitian, yakni menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memediasi pengeluaran fungsi kesehatan terhadap IPM pada kabupaten/kota di Provinsi NTT. Hasil ini juga menunjukkan tujuan penelitian tidak tercapai, terlihat dari hasil pengujian dan analisis data, serta pemaparan bukti pengolahan data yang memperlihatkan bahwa tidak ada pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam memediasi pengeluaran fungsi kesehatan terhadap IPM pada kabupaten/kota di Provinsi NTT. Berkaitan dengan teori, pada penelitian ini teori keagenan menyebutkan bahwa kurangnya pengawasan pemerintah pusat dalam memastikan kinerja pemerintah daerah menyebabkan adanya anggaran belanja yang tidak terealisasi dengan tepat atau anggaran tidak mencerminkan alokasi pemenuhan sumber daya kepada masyarakat. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi teori dan menyatakan bahwa realisasi pengeluaran fungsi kesehatan yang kurang cukup dan belum tepat sasaran oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi NTT selama tahun 2016-2021, berdampak pada munculnya berbagai permasalahan sektor kesehatan di NTT. Pengeluaran fungsi kesehatan mungkin lebih difokuskan untuk dialokasikan pada belanja operasional pemerintah (belanja rutin), belanja pegawai, belanja modal, belanja hibah, belanja transfer dan belanja tak terduga, yang proporsinya lebih besar dari pada pengeluaran pemerintah untuk belanja pembangunan pada sektor kesehatan. Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Mahulauw et al. (2016) yang memaparkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang diprosikan dengan pendapatan per kapita. Sebaliknya, hasil penelitian Nugroho (2016) tidak serupa dengan hasil penelitian ini karena membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan berkontribusi positif secara tak langsung pada peningkatan IPM melalui pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi memediasi pengaruh pengeluaran fungsi pariwisata terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi NTT

Realisasi pengeluaran fungsi pariwisata yang semakin besar dapat mendorong kinerja sektor pariwisata dan mengarah pada peningkatan perekonomian. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat yang dicerminkan melalui angka IPM. Hasil penelitian ini tidak mampu menjawab masalah penelitian, yakni memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memediasi pengeluaran fungsi pariwisata terhadap IPM pada kabupaten/kota di Provinsi NTT. Hal ini juga memperlihatkan tidak tercapainya tujuan penelitian, sebab dari hasil pengujian dan analisis data, serta pemaparan bukti pengolahan data diketahui bahwa tidak ada pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam memediasi pengeluaran fungsi pariwisata terhadap IPM pada kabupaten/kota di Provinsi NTT. Namun, penggunaan teori keagenan dalam penelitian ini terkonfirmasi, teori keagenan ini menjelaskan bahwa kurangnya pengawasan pemerintah pusat dalam memastikan kinerja pemerintah daerah menyebabkan adanya anggaran belanja yang tidak terealisasi dengan tepat atau anggaran tidak mencerminkan alokasi pemenuhan sumber daya kepada masyarakat. Sejalan dengan bunyi teori tersebut, hasil penelitian ini memaparkan bahwa besaran realisasi pengeluaran fungsi pariwisata yang belum cukup dan tidak tepat sasaran oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi NTT selama kurun waktu 2016-2021, dapat menghambat pengembangan sektor pariwisata. Pengeluaran fungsi pariwisata belum tepat sasaran, mungkin disebabkan karena alokasi belanja lebih difokuskan untuk belanja operasional pemerintah (belanja rutin), belanja pegawai, belanja modal,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

belanja hibah, belanja transfer dan belanja tak terduga, yang proporsinya lebih besar dari pada pengeluaran pemerintah untuk belanja pembangunan pada sektor pariwisata. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Pralina & Sujali (2012) yang menyatakan bahwa kegiatan pariwisata mampu memberikan dampak yang berarti terhadap pembangunan ekonomi. Namun, kontribusi pariwisata terhadap PDRB tidak signifikan atau sangat kecil, sehingga dampak yang diberikan pariwisata terhadap capaian pembangunan ekonomi tidak signifikan, serta tidak mendukung peningkatan capaian pembangunan manusia. Namun, berbeda dengan hasil-hasil tersebut, pendapat Lukito (2022) mengungkapkan bahwa sektor pariwisata berperan penting dalam mendongkrak perekonomian suatu negara.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pertama, tidak ada pengaruh pengeluaran fungsi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi NTT. Kedua, ada pengaruh pengeluaran fungsi kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi NTT. Ketiga, ada pengaruh pengeluaran fungsi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi NTT. Keempat, tidak ada pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam memediasi pengeluaran fungsi pendidikan terhadap IPM pada kabupaten/kota di Provinsi NTT. Kelima, tidak ada pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam memediasi pengeluaran fungsi kesehatan terhadap IPM pada kabupaten/kota di Provinsi NTT. Keenam, tidak ada pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam memediasi pengeluaran fungsi pariwisata terhadap IPM pada kabupaten/kota di Provinsi NTT.

Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terjadi banyak kendala dan hambatan. Salah satu faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam penelitian ini adalah waktu. Waktu penelitian yang relatif pendek dan terjadinya pandemi covid-19 yang dimungkinkan akan mempengaruhi hasil penelitian.

Saran

Sesuai dengan perolehan hasil penelitian ini, peneliti bermaksud mengutarakan beberapa saran sebagai bahan masukan atau pertimbangan. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi NTT seharusnya merealisasikan pengeluaran fungsi-fungsi ini dengan besaran yang cukup dan tepat sasaran sehingga mampu mendanai pelaksanaan program pemerintah pendukung majunya sektor pendidikan, kesehatan, maupun pariwisata yang sudah dicanangkan sebelumnya, dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan pada tiap-tiap sektor ini yang memang masih menjadi isu pembahasan di NTT. Selain itu, berdasarkan penjelasan hasil penelitian ini, peneliti selanjutnya yang hendak meneliti topik serupa disarankan untuk mempertimbangkan menggunakan objek penelitian pada kabupaten/kota di Provinsi lainnya, atau dapat menggunakan objek penelitian berupa seluruh Provinsi di Indonesia. Peneliti juga menyarankan agar peneliti selanjutnya memeriksa pengaruh belanja fungsi yang lainnya.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Afriadi, RD., Sutrasna, Y., & Josstensz, T. (2020). Pengaruh alokasi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara-negara asian emerging economies. *Jurnal Kajian Akademis dan Literasi Ilmu Ekonomi Pertahanan*, 6(2), 148–160. <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/EP/article/view/865/769>
- Ariansyah, S. (2018). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia melalui pendapatan domestik regional bruto di Indonesia (studi kasus pemerintah daerah tingkat provinsi dengan IPM tinggi, sedang, dan rendah). *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik*, 3(4), 270–283. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v3i4.77>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia 2023*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>
- Lukito, L. (2022). *Kontribusi industri pariwisata terhadap pembangunan indeks manusia* (cetakan pertama). Widina Bhakti Persada Bandung. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/492217/kontribusi-industri-pariwisata-terhadap-pembangunan-indeks-manusia#id-section-title>
- Mahulauw, AK., Santosa, DB., & Mahardika, P. (2016). Pengaruh pengeluaran kesehatan dan pendidikan, serta infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(2), 122–148. <https://doi.org/10.22219/jep.v14i2.3850>
- Maksvytienė, I., & Jankevičiūtė, E. (2018). Evaluation of tourism sector impact on economic growth (Accession No. 131873692) [Abstrak dari Penulis]. *Applied Economics: Systematic Research*, 12(1), 13–26. <https://doi.org/10.7220/AESR.2335.8742.2018.12.1.1>
- Mongan, J. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik*, 4(2), 163–176. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.122>
- Nugroho, G. (2016). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik*, 1(1), 39–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v1i1.57>
- Pralina, CY., & S. (2012). Keterkaitan pariwisata terhadap pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2004-2009. *Jurnal Bumi Indonesia*, 1(2), 49–57.
- Putra, W. (2017). Dampak pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di perbatasan Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan*, 6(2), 120–138. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JJ/article/view/22987/pdf>
- Putri, H. (2019). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah sektor infrastruktur, sektor pertanian, sektor pariwisata dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2011-2015. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 5(2), 237–251.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

<https://doi.org/10.29303/jseh.v8i2.65>

Suparno, H. (2014). Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur. *Ekonomika-Bisnis*, 5(1), 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jibe.v5i1.2254>

